

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Demokrasi dilandasi dengan prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Rakyat yang berkuasa sehingga berhak terlibat dalam aktivitas politik. Untuk mewujudkan keberadaan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi adalah dengan melaksanakan pergantian pemimpin dengan cara yang disebut pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan salah satu wadah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga negara seperti lembaga eksekutif dan legislatif.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) menentukan : “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Mana kedaulatan sama dengan makna kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang dalam taraf terakhir dan tertinggi wewenang membuat keputusan. Tidak ada satu pasal pun yang menentukan bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu negara demokrasi. Namun, karena implementasi kedaulatan rakyat itu tidak lain adalah demokrasi, maka secara *implisit* dapatlah dikatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi. Hal yang demikian wujudnya adalah, manakala negara atau pemerintah menghadapi masalah besar, yang bersifat nasional, baik di bidang kenegaraan, hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya

ekonomi, agama “semua orang warga negara diundang untuk berkumpul disuatu tempat guna membicarakan, merembuk, serta membuat suatu keputusan.” ini adalah prinsipnya. (Soehino,2010: 43-44)

Pemilihan umum dilaksanakan untuk menentukan orang-orang yang bisa dan mampu untuk masuk kedalam lingkaran elit politik, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Pelaksanaan pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu pertama untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menghasilkan 4 partai besar yang mendominasi parlemen dan konstituante, yaitu Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdhatul Ulama (NU), serta Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemilu ini dianggap sebagai tonggak sejarah mulainya kehidupan demokrasi di Indonesia dan sampai saat ini masih dinilai sebagai pemilu yang diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. (Miriam Budiardjo, 2010: 483)

Salah satu bentuk pelaksanaan pemilu yang demokratis yaitu pada proses pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang melibatkan rakyat untuk dapat memilih secara langsung calon presiden dan wakil presiden dengan bebas menentukan siapa saja yang akan mereka pilih. Pemilihan presiden secara langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 dengan melibatkan masyarakat memilih secara langsung DPR, DPD, DPRD serta presiden dan wakil presiden. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden terdapat dua kandidat calon yaitu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Muhammad Yussuf Kalla dan pasangan Megawati Soekarno Putri dengan K.H Ahmad Hasyim Muzadi. Pada pemilu tersebut dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono

yang terpilih sebagai presiden dan Muhammad Yussuf Kalla sebagai wakil presiden pada pemilu tahun 2004.

Pemilu 2009 diselenggarakan serentak pada 9 april 2009 untuk memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD serta DPRD se-indonesia periode 2009-2014. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan 8 Juli 2009 yang hanya berlangsung satu putaran. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2009 terdiri dari 3 pasangan calon, yaitu, pasangan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto, Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, serta Jusuf Kalla yang berpasangan dengan Wiranto. Pada pilpres 2009 ini di menangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.

Pada pemilihan presiden tahun 2014 merupakan pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Pemilihan presiden tahun 2014 terdiri dari dua pasang kandidat yang akan bertarung yaitu pasangan nomor satu Prabowo Subianto dan M. Hatta Rajasa kemudian pasangan nomor urut dua Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla. Dalam pemilihan presiden 2014 ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi munculnya sejarah fenomena relawan politik yang mendeklarasikan diri dalam mendukung salah satu kandidat pasangan calon presiden. Diantara relawan-relawan tersebut kebanyakan merupakan relawan pendukung pasangan Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla.

Pada pemilu serentak tahun 2019 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pelaksanaan pemilu serentak, muncul penafsiran bahwa Pemilu 2019 akan diselenggarakan dengan 5 kotak. Secara

sederhana putusan itu banyak dimengerti sebagai sekedar perbedaan dalam penyelenggaraannya dimana Pemilu 2019 akan diselenggarakan secara bersamaan untuk memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. (bphn.go.id, 23 januari 2014). Pemilihan presiden tahun 2019 terdiri dari dua pasang kandidat yang akan bertarung yaitu pasangan nomor urut satu Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin sebagai pasangan petahana kemudian pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno.

Yang menarik pada pemilu tahun 2019 ini adalah kata *milenials*. *Milenials* sering disebut-sebut dalam politik pemilihan presiden tahun 2019 karena suara kaum *milenials* dianggap penting karena jumlahnya yang diduga mencapai lebih dari 50% pemilih.(kompas.tv.com,07 september 2018). Pada konteks pemilu, kaum *milenials* dikategorikan sebagai pemilih muda/pemula. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah pernah kawin yang mempunyai hak pilih dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mendata, sejak pemilu 2014 jumlah pemilih muda terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berikut adalah data mengenai jumlah pemilih muda :

Gambar 1.1 Tentang Perbandingan Pemilih Pemula



Sumber : Kompas dan KPU tahun 2018.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberitakan pada Berita Kompas TV pada tanggal 07 September 2018 pukul 14.30 WIB menyebutkan bahwa data pemilih *milenials* memiliki rentan usia usia 17 hingga 30 tahun. Dalam rentan usia tersebut terdapat pemilih pemula yang berusia 17 hingga 20 tahun. Pada tahun 2014 pemilih pemula yang berusia 17 hingga 20 tahun berjumlah 14 juta orang. Sedangkan pemilih usia 20 tahun hingga 30 tahun berjumlah 45,6 juta orang. Total jumlah pemilih muda pada tahun 2014 sebanyak  $\pm 60$  juta orang. Kemudian pada pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendata adanya peningkatan sejumlah pemilih muda hingga mencapai sekitar  $\pm 100$  juta orang. Jumlah ini berdasarkan atas usia pemilih muda pada tahun 2014 ditambah dengan pemilih pemula pada tahun 2019. Dengan demikian jumlah ini lebih dari 50% total pemilih yang telah ditetapkan KPU sekitar 186.379.878 juta orang.(kpu.go.id, 16 november 2017)

Pengaruh pemilih muda atau yang sering disebut dengan kaum *millennial* ini memiliki peran penting dalam kesuksesan pilpres 2019. Hal ini disadari dengan adanya peningkatan jumlah pemilih muda yang jumlahnya terus meningkat dari masa ke masa. Berkaitan dengan hal ini, kesuksesan pilpres 2019 membutuhkan kesadaran pemilih muda dalam berkontribusi untuk menentukan nasib Bangsa Indonesia dimasa depan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menggali informasi visi misi dan kritis terhadap kebijakan dari masing-masing calon pasangan presiden 2019.

Didalam proses pesta demokrasi untuk menyambut pemilu 2019 ini terlihat peran kaum *millennial* yang begitu besar dalam ikut serta mengsucceskan terselenggaranya pemilihan presiden tahun 2019. Hal ini ditandai dengan adanya antusiasme kaum *millennial* salah satunya dalam bentuk relawan (*volunteer*) politik untuk memberikan dukungan terhadap masing-masing calon pasangan yang didukung. Partisipasi dalam konteks ini dapat dilihat sebagai mobilitas politik secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak politisi. Adanya bentuk dukungan dari relawan politik ini merupakan gambaran dari demokrasi partisipatoris yakni demokrasi yang lebih memberikan perluasan akan partisipasi publik terhadap kepedulian persoalan publik.

Munculnya fenomena relawan politik ternyata menjadi persaingan sengit terhadap pilpres 2019. Relawan politik yang mendukung pasangan oposisi Prabowo-Sandi mulai bermunculan dan menunjukkan adanya persaingan untuk menandingi relawan petahana Jokowi-Ma'ruf. Relawan politik pada kubu oposisi secara otomatis akan lebih kritis terhadap kebijakan politik yang dibuat pada

pemerintahan yang sedang berkuasa saat ini. Dengan begitu relawan politik oposisi akan melakukan sebuah pergerakan yang dapat memberikan suara kritis terhadap kekurangan dalam kebijakan yang salah atau kurang tepat.

Salah satu relawan politik independen yang terbentuk dari kaum *millennial* yang memiliki eksistensi dalam pilpres 2019 adalah Gerakan Milenial Indonesia (GMI). Relawan politik ini hadir untuk memberikan dukungannya terhadap pasangan oposisi calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Sandiaga Salahudin Uno karena potensi kaum milenial dirasa lebih kreatif, inovatif dan jiwa progresif. Dalam hal ini mereka ingin mengakomodir anak-anak muda yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme serta jawaban atas keresahan pemerintah yang selama ini beranggapan bahwa anak muda banyak yang apatis dengan dunia politik.

GMI sudah ada di 34 provinsi dan aktif di 9 provinsi secara structural, kami bersama mendukung Prabowo-Sandi, menurut data yang dihimpunnya telah terkumpul sebanyak 14 ribu anak muda yang merapatkan barisan untuk GMI. GMI mewadahi para anak muda untuk bersuara dalam dunia politik dan juga sebagai tempat untuk menyuarakan isi hati para anak muda membawa Indonesia lebih maju. Hal ini di sampaikan langsung oleh koordinator nasional GMI, Tarisa Anindita Tutuko. Bentuk konkrit yang harus dilakukan oleh para relawan Prabowo-Sandi ini terutama kaum *millennial* dalam rangka memenangkan pemilihan presiden pada 17 april 2019. Tim bergerak sesuai dengan visi-misi dan program yang disajikan Prabowo-Sandi , karena Prabowo-Sandi dinilai sejalan dengan pola hidup dan apa yang diinginkan oleh kelompok *millennial* seperti

industri kreatif, bantuan modal usaha, lapangan kerja bagi anak muda, dan juga kesempatan membuka usaha yang seluas-luasnya adalah bukti bahwa Prabowo-Sandi membawa gairah baru dalam perekonomian Indonesia dan bersentuh langsung dengan anak muda. (solo.tribunews.com, 30 maret 2019)

Salah satu nya GMI D.I Yogyakarta yang beranggotakan 250 anggota milenial Indonesia dari berbagai background kampus di Yogyakarta yang berbeda-beda mereka terdiri dari kalangan mahasiswa aktif serta alumni mahasiswa juga bergabung kedalam wadah pendidikan politik bagi anak muda yaitu Gerakan Milenial Indonesia (GMI) D.I Yogyakarta. Dengan mempunyai misi untuk memberikan dukungan politik terhadap pasangan calon presiden nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno untuk memenangkan Prabowo-Sandi pada pilpres 2019. Mereka bergerak untuk mengkampanyekan Prabowo-Sandi serta menyampaikan visi dan misi Prabowo-Sandi terutama di sektor lapangan pekerjaan, kesehatan, dan kondisi perekonomian saat ini kepada masyarakat yang berada di Kota Jogja hingga ke pelosok DIY yang terdiri atas 5 kabupaten/kota yang ada di DIY seperti Kota Jogja, Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Demi meningkatkan elektabilitas Prabowo Sandi pada pemilihan presiden 2019.

Dengan aktif nya Gerakan Milenial Indonesia (GMI) dalam dunia politik Indonesia baik ketika pemilu sampai pasca pemilu dan menunjukkan bahwa GMI konsistensinya dalam partisipasi politik sebagai relawan non partai politik di Indonesia. Hal tersebut menjadi latar belakang ketertarikan peneliti untuk melakukan peneliti mengenai bagaimana motif dukungan Gerakan Milenial

Indonesia (GMI) D.I.Yogyakarta dalam mendukung pasangan calon Presiden Prabowo-Sandi pada pilpres 2019. Apakah Gerakan Milenial Indonesia (GMI) D.I.Yogyakarta dapat menjadi sebuah wajah kemajuan demokrasi di Indonesia yang tidak hanya didominasi oleh partai dan elit politik saja. Akankah relawan independen ini dapat menunjukkan bahwa peran masyarakat sangatlah diperlukan dalam mewujudkan kemajuan negara, atau malah sebaliknya Gerakan Milenial Indonesia (GMI) D.I.Yogyakarta hanya dijadikan sebagai alat politik dari penguasa demi mendapatkan kekuasaanya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis ingin mengetahui :

1. Bagaimana motif dukungan Gerakan milenial Indonesia (GMI) D.I.Yogyakarta dalam mendukung pasangan calon Presiden Prabowo-Sandi pada pilpres 2019 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana motif dukungan relawan independen terhadap elektabilitas Prabowo-Sandi pada pilpres 2019 sebagai relawan politik di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pemahaman mengenai relawan independen yang ada dalam perkembangan politik di Indonesia saat ini.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan:

- a. Menjelaskan perkembangan relawan independen dalam politik di Indonesia.
- b. Mengkaji mengenai motif dukungan relawan politik independen dalam partisipasinya sebagai organisasi non parpol di Indonesia.

#### **E. Kajian Pustaka**

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan dari hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Peneliti sendiri mendapatkan berbagai acuan penelitian terdahulu yang menjadi pendukung penyusunan proposal ini, antara lain sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis oleh Budi Nugroho (2018), di dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang peran relawan Pro Jokowi Di DIY dalam partisipasinya sebagai organisasi relawan di Indonesia. Pasca pemilu, Peran Projo telah berubah drastis dimana status Relawan Projo berubah menjadi ormas. Projo tidak lagi sekedar relawan yang mencari massa untuk mendukung Jokowi. Projo telah bertransformasi menjadi organisasi yang mendukung pemerintahan. Baik dengan membantu program dimana Projo DIY membantu pemerintah dalam mengsucceskan program Indonesia pintar, kegiatan bakti sosial dan kegiatan bantuan sosial bencana alam. Projo DIY juga menjalankan pengawasan dengan memanfaatkan struktur organisasi yang ada dipusat, namun tidak ada timbal balik dari pemerintah terhadap *output* yang keluar dari proses pengawasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Alhafiz Atsari (2016), di dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang Jogja Independent (JOINT) merupakan sebuah gerakan sosial yang pertama kali di Kota Yogyakarta dan di Indonesia yang melakukan sebuah proses kandidasi calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Kerelawanan menjadi pondasi gerak komunitas ini. Dalam penominasian calon, setiap warga Negara Indonesia berhak mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon walikota melalui jalur independen yang dilakukan oleh JOINT. Calon-calon tersebut hanya diminta untuk menyerahkan riwayat kehidupan, visi dan misi tanpa membatasi apa pekerjaan serta tanpa dipungut biaya seperti yang sering terjadi di partai politik. Dalam pemilihan penyeleksi, JOINT memilih beberapa orang yang berkompentensi dan berintegritas serta mau bekerja secara sukarela menjadi tim penyeleksi yang akan melaksanakan tugas uji bakal calon. Namun, pemilihan atau penunjukan para penyeleksi ini tidak melibatkan seluruh elemen yang bergabung di dalam JOINT.

Penelitian yang dilakukan oleh Ustad Mangku Alam (2017), yang di dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana kontestasi presidensial 2014 yang diwarnai oleh kehadiran relawan politik sebagai manifestasi dari meningkatnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam demokrasi substansial. Penelitian ini berpendapat bahwa kebangkitan gerakan sosial telah melahirkan tradisi *voluntarisme* dalam politik. Relawan politik yang bergerak secara *offline* dan *online* dapat meningkatkan partisipasi publik.

Skripsi yang ditulis oleh Juwita Anggraini (2015), skripsi tersebut menjelaskan tentang faktor faktor yang mendorong munculnya gerakan relawan

politik dan bentuk gerakan relawan politik Joko Widodo pada pemilihan presiden 2014 di Surakarta. Kemudian gerakan sosial relawan politik Joko Widodo pada pemilihan presiden 2014 muncul akibat adanya akumulasi kekecewaan dimasyarakat akibat terjadinya kesenjangan antara ekpektasi dan realita. Kemudian juga disebabkan oleh *figure* Joko Widodo yang memiliki *track record* dalam kepemimpinan yang bagus. Mayoritas relawan tidak memiliki struktur dan sistem rekrutmen yang formal, sukarela dan memiliki relasi dengan partai politik pendukung. Tujuan relawan adalah mensosialisasikan Joko Widodo kepada masyarakat untuk mempengaruhi preferensi masyarakat.

Penelitian yang ditulis oleh Nopri Hariadi (2015), jurnal tersebut menjelaskan tentang landasan kinerja, bentuk kinerja Relawan Demokrasi (Relasi), dan kendala-kendala yang dihadapi Relawan Demokrasi (Relasi) dalam pelaksanaan pileg tahun 2014, khususnya di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menunjukkan bahwa landasan terbentuknya program Relawan Demokrasi (Relasi) adalah partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Mekanisme kerja yang digunakan berbeda-beda yaitu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Secara keseluruhan anggota Relasi telah bekerja sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh. Kendala yang dihadapi saat sosialisasi umumnya adalah gaya bahasa, teknik, waktu, dan mental. Selain itu pola pikir masyarakat yang sebagian besar belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya demokrasi.

Penelitian yang ditulis oleh Evi Kurnia Sari (2015), jurnal tersebut menjelaskan tentang deskripsi dan analisis strategi kampanye politik Gabungan Relawan Jokowi-JK kaltim dalam pemilihan presiden tahun 2014 di Kota

Samarinda yang difokuskan pada sejarah formasi dan konfigurasi Gabungan Relawan Jokowi-JK Kaltim, strategi kampanye politik Gabungan Relawan Jokowi-JK Kaltim dalam pemilihan presiden di Kota Samarinda, Strategi yang paling menentukan keberhasilan Gabungan Relawan Jokowi-JK Kaltim dalam pemilihan presiden tahun 2014 di Kota Samarinda. Strategi kampanye politik gabungan relawan Jokowi-JK Kaltim meliputi : menyatukan visi relawan, pembagian dan fungsi relawan, pendekatan persuasif serta pencitraan calon.

Penelitian yang ditulis oleh Asna'ul IImiyah (2018), jurnal tersebut menjelaskan tentang strategi Relawan Demokrasi Kabupaten Malang dalam proses sosialisasi politik kepada pemilih pemula menjelang pilkada Jatim tahun 2018. Strategi sosialisasi politik ini mempunyai sasaran kepada siswa sekolah SMA/SMK sederajat dan anggota organisasi kepemudaan. Metode sosialisasi yang digunakan adalah metode tatap muka dengan teknik diskusi dan ceramah. Materi yang disampaikan mencakup tentang penyelenggaraan pilkada meliputi tanggal pemilu, perkenalan pasangan calon dan himbauan kepada pemilih pemula untuk mencoblos.

Penelitian yang ditulis oleh Annisa Senova (2016), jurnal tersebut menjelaskan tentang penerapan literasi media sebagai strategi komunikasi tim sukses relawan pemenangan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla di Kota Bandung. Kemampuan mengidentifikasi, menentukan, mengorganisir, dan menggunakan media, serta menjadikan informasi sebagai bahan pertimbangan pembuatan keputusan tim sukses relawan pemenangan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla di Bandung. Media sosial menjadi media utama dalam proses

penyampaian pesan kepada khalayak di Kota Bandung. Terdapat beberapa jenis media sosial yang akan digunakan secara rutin dalam proses tersebut, yaitu *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, dan *Youtube*. Namun, tim sukses relawan media sosial hanya fokus kepada dua jenis media sosial yang dianggap dapat mempengaruhi pandangan publik. *Twitter* dan *Instagram* dianggap mampu menjadi jejaring sosial yang efektif dalam proses penyampaian pesan politik pemilu 2014. Penyampaian informasi oleh timses relawan media sosial kepada masyarakat melalui *Twitter* dan *Instagram* dianggap sangat efektif dan tepat. Konten-konten yang disediakan oleh akun *Twitter* sangat mudah untuk diakses oleh semua kalangan.

Penelitian yang ditulis oleh Zamzam Muhammad Fuad (2015), menjelaskan tentang bagaimana peran, kendala dan upaya Relawan Demokrasi Banyumas dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum legislatif 2014 di Banyumas dan implikasinya terhadap ketahanan politik Banyumas. Peran Relawan Demokrasi yaitu sebagai agen pendidikan politik dan agen pendidikan pemilu. Relawan Demokrasi Banyumas juga memiliki fungsi vital dalam membangun ketahanan politik di Banyumas. Hal ini ditunjukkan Relawan Demokrasi manakala berperan sebagai agen pendidikan politik dan pemilu. Dengan kata lain, Relawan Demokrasi Banyumas memiliki peran positif dalam mewujudkan ketahanan politik yang tangguh di Banyumas.

Penelitian yang ditulis oleh Rizka Aulia (2017), menjelaskan tentang strategi pemenangan yang dilakukan oleh Relawan Ahok dalam Upaya Pemenangan Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Strategi kampanye

politik yang dilakukan pertama yaitu, *pull marketing politic* dengan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi melalui kegiatan menarik yang dibuat, kedua *pull marketing party* dengan mengoptimalkan media digital untuk menyebarkan pesan-pesan politik, serta mengawasi isu yang berkembang, dan ketiga *pass marketing politic* menggandeng kalangan *public figure*, untuk memberikan testimoni positif tentang kinerja maupun *figure* Ahok secara personal.

Table 1.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terhadulu

No.	Jenis Pengelompokan	Temuan/Hasil
1.	Strategi Politik	Evi Kurnia Sari (2015), Asna'ul Iimiyah (2018), Annisa Senova (2016), Rizka Aulia (2017). Menjelaskan tentang strategi politik dalam pemilu yang meliputi pendekatan persuasif, aksi sosial, hiburan masyarakat, sosialisasi politik, serta penyampaian pesan politik melalui media sosial.
2.	Peran Gerakan Relawan Politik	Budi Nugroho (2018), Ustad Mangku Alam (2017), Juwita Anggraini (2015), Zamzam Muhammad Fuad (2015), Nopri Hariadi (2015). Menjelaskan tentang peran gerakan relawan politik dalam menjalankan pengawasan, membangun ketahanan politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia.
3.	Gerakan Sosial	Alhafiz Atsari (2017), menjelaskan tentang Jogja Independent (JOINT) yang merupakan gerakan sosial yang pertama kali di Indonesia yang melakukan sebuah proses kandidasi calon perseorangan untuk mengikuti pilihan kepala daerah.

Sumber : Diolah oleh penulis (2019)

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut membahas tentang strategi politik, peran gerakan relawan politik dan gerakan sosial dalam pemilu di Indonesia. Namun, belum ada penelitian yang komprehensif mengenai motif dukungan relawan independen. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji tentang motif dukungan relawan independen terhadap elektabilitas Prabowo-Sandi pada pilpres 2019 studi atas Gerakan Milenial Indonesia (GMI) D.I.Yogyakarta.

## **F. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Teori Motif Politik**

Motif adalah asal kata dari motivasi, yang dikenal sebagai *motive* yang berarti dorongan. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat (*driving force*). Pada dasarnya motivasi berasal dari motif yang merupakan pengertian yang melingkupi penggerak, baik alasan-alasan maupun dorongan dalam diri manusia. Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal, maupun internal. Dalam kajian psikologi, motif di maknai sebagai alasan seseorang yang mendasarinya untuk melakukan sesuatu. Motif bukanlah sesuatu yang tampak. Sebab, itu tersembunyi. Motif dapat diketahui, di antaranya dari pengakuan seseorang terhadap alasannya melakukan suatu tindakan. McClelland, (dalam Hamzam B Uno, 2013:9)

Dalam dunia politik, mendapatkan kekuasaan adalah tujuan bagi para aktor politik. Kekuasaan bukan keperkasaan dan gagah-gagahan, tapi wadah dan amanah untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Pria penguasa hakikatnya adalah manajer yang mengatur dan mengeluarkan kebijakan yang berdampak baik maupun buruk bagi masyarakat. Motif politik bukanlah suatu hal yang asing dalam dunia perpolitikan di dunia, termasuk di Indonesia. Motif politik berkaitan dengan kepentingan politik individu, seperti kepentingan untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur, kepentingan untuk mewujudkan bangsa dan masyarakat yang lebih baik, atau bahkan kepentingan untuk memperoleh dukungan masyarakat, kepentingan untuk mendapatkan simpati publik, dan juga kepentingan untuk kekuasaan.

McClelland, (dalam Hamzam B Uno, 2013:9) berpendapat motif merupakan implikasi pada hasil pertimbangan yang telah di pelajari (*reintegration*) dengan ditandai suatu perubahan pada situasi afektif. Sumber utama munculnya motif adalah sebuah rangsangan perbedaan situasi sekarang dan situasi yang diharapkan, sehingga tanda perubahan tampak pada adanya perbedaan afektif saat munculnya motif dan saat usaha pencapaian yang diharapkan. Tujuan ini dapat berupa prestasi afikasi ataupun kekuasaan. Motif politik menurut Beck & Sorauf (1992:115-126) terdiri dari tiga motif di antaranya :

1. Motif Insentif Material ( *Material Incentives* )

- a. Seseorang berpartisipasi dalam dunia politik untuk mencari perlindungan, perlindungan yang dimaksud disini adalah lebih mendapatkan kepentingan individu atau mendapatkan imbalan yang setimpal.
- b. Untuk menjadi pejabat yang dipilih (*elected office*), jalan pintas terbaik dalam mendekati diri dengan sang penguasa pemerintah maupun partai jika ingin melanggengkan kekuasaan. Kekuasaan dan jabatan adalah sesuatu yang di damba-dambakan setiap orang, karena dengan jabatan dan kekuasaan itulah orang akan mendapatkan suatu kebanggaan dan keuntungan.
- c. Untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi (*preferment*). Menjadi pejabat publik memiliki status sosial yang sangat tinggi. Mereka ingin dihormati dan di hargai sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan derajat seseorang. Kenikmatan peran sebagai mendapatkan status sosial yang tinggi membuat status pejabat publik menjadi impian.

## 2. Motif Insentif Solidaritas (*Solidarity Social Incentives*)

Motif ini mencari kehidupan sosial baru dari yang selama ini mereka miliki. Mendapatkan status sosial yang tinggi, inilah yang akan membuat status pejabat publik menjadi impian untuk mendapatkan jaringan yang baru.

Menjadikannya sesuatu kekuatan untuk mencapai tujuan bersama dengan menghadirkan rasa simpati dan perasaan emosional serta moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok. Dalam mengidentifikasi motif insentif solidaritas menimbulkan kesulitan disebabkan bersifat non materi hanya bisa dirasakan.

### 3. Motif Insentif Idealisme ( *Purposive Issued Based Incentives* )

Motif ini yakni keinginan untuk memperjuangkan sesuatu yang bersifat ideal. Memperjuangkan kepentingan rakyat lebih utama ketimbang kepentingan pribadi. Sebagai aktivitas partai harus memiliki kemampuan manajemen strategis meliputi kemampuan menerjemahkan ideologi visi, misi, platform partai ke dalam program kerja yang kemudian dapat menarik minat calon pemilih mereka lantaran dianggap mewakili dan identik dengan kepentingan rakyat.

## 2. Teori Relawan Politik.

Suryadi (dalam Arianto.2014: 131) menjelaskan bahwa secara histografi politik, istilah Relawan (*volunteer*) muncul sejak tahun 1755, yang dikenalkan oleh seorang warga Negara Perancis M. Fr Volontaire ketika memberi pelayanan kepada tentara yang sedang berperang. Tugas dari seorang relawan adalah mengabdikan secara ikhlas dalam kegiatan untuk mendorong, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas kehidupan di bidang sosial, budaya dan ekonomi. Dimana hal tersebut bukan hanya sekedar pemikiran, melainkan juga usaha untuk membela serta mewujudkan pemikiran tersebut.

Veni (dalam Sutrisno. 2015: 4) memberikan penjelasan mengenai arti relawan, dimana relawan adalah seorang yang secara sukarela (*uncoerced*) menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran dan keahliannya untuk menolong orang lain (*help others*) serta sadar bahwa tidak akan mendapatkan upah gaji atas apa yang telah disumbangkan (*unremunerated*). Menjadi relawan adalah salah satu aktivitas yang dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud kepedulian dan komitmennya terhadap sebuah visi tertentu. Relawan dan kerelawanan memiliki konotasi yang sangat positif di dalam masyarakat. Relawan dan aktivitas kerelawanan menjadi sebuah gerakan sosial sekaligus menjadi modal sosial yang dahsyat untuk menciptakan sebuah perubahan.

Meningkatnya pengaruh relawan politik dalam bentuk partisipasi pada kontestasi pemilu presiden 2014 begitu terlihat, dimana ini dibuktikan dengan banyaknya para relawan yang bahu-membahu untuk turun ke jalan mendukung calonnya masing-masing. Hal tersebut seolah menggambarkan kedewasaan mereka dalam mengawal transisi demokrasi. Fenomena ini sejalan dengan pendapat Verba, Schlozman, dan Brady (dalam Arianto.2014: 134) bahwa partisipasi warga negara merupakan jantung demokrasi. Artinya, bahwa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, relawan politik telah mampu membangkitkan semangat demokrasi di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi di Indonesia telah mengarah ke demokrasi kerakyatan yang berproses dan bergerak dari bawah ke atas (*bottom up*). Bukan sebaliknya, dimana demokrasi elitis yang hanya dimonopoli oleh sebagian elit politik sebagai pelaku utama.

### 3. Teori Pemilu

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menanamkan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.

Demokrasi dan pemilu yang demokratis Saling merupakan “*qonditio sine qua non*” *the one can not exist without the others*. Dalam arti bahwa pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik (Veri Junaidi, 2009: 106).

Pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan bahwa kepada rakyatlah para pejabat bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya (David Bentham dan Kevin Boyle, 2000). Selanjutnya Prof Mahfud MD mengatakan bahwa kedaulatan rakyat mengandung pengertian adanya pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, menunjukkan bahwa pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) di mata rakyat (Moh. Mahfud MD, 1999). Pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang mendapatkan pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena legitimasi tersebut, pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya (Tim ICCE UIN Jakarta, 2003). Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintahan yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui

pemilihan dari rakyat bukan dari pemberian wangsit atau kekuasaan supranatural.

Pemilu yang adil dan bebas adalah pemilu-pemilu yang kompetitif adalah piranti utama membuat pejabat-pejabat pemerintah bertanggungjawab dan tunduk pada pengawasan rakyat. Pemilu juga merupakan arena penting untuk menjamin kesetaraan politis antara warga negara, baik dalam akses terhadap jabatan pemerintahan maupun dalam nilai suara serta kebebasan dalam hak politik (David Bentham dan Kevin Boyle, 2000). Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu di anggap sebagai lambing, sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Dengan kata lain, pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **G. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara tepat suatu fenomena yang sedang diteliti. Tujuan dari definisi konseptual dalam penelitian ini adalah menjelaskan mengenai pembatasan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya, yaitu :

### **1. Motif Politik**

Motif politik adalah suatu dorongan atau usaha untuk menggerakkan seseorang demi mencapai tujuan tertentu. Politik merupakan seni dalam meraih sebuah kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional yang ditempuh setiap warga negara.

### **2. Relawan Politik**

Relawan merupakan suatu perbuatan mulia yang dilakukan secara sukarela, tulus dan ikhlas. Oleh karena itu peran relawan dalam demokrasi sangat dibutuhkan agar terciptanya partisipasi politik dalam berdemokrasi.

### **3. Teori Pemilu**

Pemilu merupakan sebuah proses akumulasi dari kehendak masyarakat dalam sebuah prosedural demokrasi. Pemilu sendiri diselenggarakan untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.

## H. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dikemukakan oleh Walizer & Wienir (dalam Ritonga 2004: 26) adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengukur variabel atau konsep definisi operasional tersebut membantu kita untuk mengklasifikasi gejala di sekitar ke dalam kategori khusus dari variable. Dalam penelitian ini akan dilakukan sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah :

Tabel 1.2 Operasional Konsep

Variabel	Indikator	Parameter
Motif Politik	Motif Insentif Material	Berkenaan dengan mendekati diri dengan aktor pemerintah maupun partai jika ingin melanggengkan kekuasaan dalam memperoleh kedudukan yang lebih tinggi.
	Motif Insentif Solidaritas	Berkenaan dengan kehidupan sosial baru untuk mendapatkan jaringan yang baru. Perasaan emosional serta moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok.
	Motif Insentif Idealisme	Berkenaan dengan keinginan untuk memperjuangkan sesuatu yang bersifat ideal. Memperjuangkan kepentingan rakyat lebih utama ketimbang kepentingan pribadi.

Sumber : Diolah oleh penulis

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan studi kasus (*case study*). Penelitian ini memutuskan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi kasus ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003:63).

Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi, penelitian berusaha mencermati dan menganalisis tentang Motif Dukungan Relawan Independen Terhadap Elektabilitas Prabowo Sandi Pada Pilpres 2019 Studi Atas Gerakan Milenial Indonesia (GMI) Jogja dengan mewawancarai narasumber yang terlibat langsung dalam Proses dukungan Gerakan relawan independen terhadap Elektabilitas Prabowo Sandi pada pilpres 2019 tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, maka data yang didapat akan lebih mendalam, akurat, dan bermakna sehingga tujuan dilakukannya penelitian ini dapat tercapai.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

yaitu data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Sumber data data ini berupa kata-kata

dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui informan dalam wawancara mendalam ketika di lapangan (Moleong, 2016: 157). Data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan narasumber. Data primer dalam penelitian ini diantaranya adalah wawancara dengan koordinator GMI Yogyakarta, Juru bicara GMI Yogyakarta, Juru bicara GMI Pusat, dan Milenial GMI lainnya sehingga akan mendapatkan data yang lebih akurat.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder, yang dapat melengkapi dan membantu peneliti bila data primer terbatas atau sulit diperoleh. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber tertulis berupa buku, sumber dari asip, dokumen resmi, dan dokumen pribadi (moleong, 2016: 157).

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam upaya memperoleh data-data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung dengan informan.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Kriyantono, 2006: 100). Dalam tahap ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan narasumber dengan bahan-bahan wawancara yang sudah disiapkan dan disusun sebelumnya.

Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu meliputi :

1. Koordinator Gerakan Milenial Indonesia (GMI) Yogyakarta.
2. Juru bicara Gerakan Milenial Indonesia (GMI) Yogyakarta
3. Anggota Gerakan Milenial Indonesia (GMI) Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dari hasil penelitian ini dapat menggunakan data-data berupa foto ataupun gambar yang didapatkan selama penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dapat diartikan sebagai suatu catatan tertulis atau bergambar yang berkaitan dengan sesuatu hal yang tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Data yang telah diperoleh peneliti, nantinya akan dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman (Pawito, 2008:104). Yang menyebutkan bahwa teknik ini terdiri tiga

komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terdapat langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data proses pemilihan dan pemutusan data-data yang relevan dengan masalah penelitian dilakukan dengan cara membuat ringkasan dan mengkode data. Reduksi data juga disebut sebuah proses analisis data dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Proses ini berlangsung terus menerus seiring dengan berjalannya penelitian dan berlanjut terus hingga laporan akhir lengkap tersusun. Dalam mereduksi data penelitian ini memfokuskan pada data yang berkaitan dengan Motif Dukungan Relawan Independen Terhadap Elektabilitas Prabowo Sandi pada Pilpres 2019 studi atas Gerakan Milenial Indonesia Yogyakarta.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan upaya pengumpulan informasi kedalam suatu konfigurasi yang mudah dipahami. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Untuk menganalisis data kualitatif dengan valid, sajian data harus mudah dipahami dan dapat disajikan sesederhana mungkin. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan sering juga disebut sebagai proses verifikasi. Pada penarikan kesimpulan, penulis dari awal mengumpulkan data dan mencari arti data yang telah dikumpulkan. Data yang telah tersusun kemudian dihubungkan dan dilakukan reduksi data dengan membandingkan data antara satu dengan yang lainnya, lalu menyeleksi, menyederhanakan, dan mengubah data kasar yang berasal dari catatan-catatan lapangan menjadi sebuah sajian hasil analisis data. Setelah data disajikan baru dapat memberikan makna, tafsiran, argumen, dan dicari hubungan antara satu komponen dengan komponen lainnya sehingga dapat dengan mudah ditarik kesimpulan.

## **J. Sistematika Penulisan**

Terdapat rencana sistematika penulisan dalam penelitian ini. Pada penulisan skripsi ini terdiri empat bab yaitu pendahuluan, deskripsi objek penelitian, pembahasan, dan penutup.

Dalam Bab I terdapat pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisa, kajian pustaka, kerangka dasar teori, definisi konseptual, definisi operasional dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Sedangkan Bab II terdapat deskripsi objek penelitian yaitu membahas mengenai organisasi gerakan relawan independen yaitu Gerakan Milenial Indonesia (GMI) D.I.Yogyakarta..

Sedangkan Bab III terdapat pembahasan yang berisi tentang hasil wawancara dan analisis dokumen yang berkaitan dengan penelitian motif dukungan relawan independen terhadap elektabilitas Prabowo Sandi pada pilpres 2019 studi atas gerakan milenial Indonesia (GMI) D.IYogyakarta.

Bab IV yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.